

A. Kekuasaan Kehakiman

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi, untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penatan sistem peradilan yang terpadu,”

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal1 Ayat 3 UUD 1945, maka setiap tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya harus mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Adapun ciri khas negara hukum sebagai berikut:

a. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

²⁸Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* Op.Cit h.42-62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Salah satu prinsip negara hukum adalah diakuinya peradilan dalam perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman, undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁹

Ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung beserta badan-badan peradilan dibawahnya dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun peradilan dibawah mahkamah agung meliputi peradilan dalam lingkungan: badan peradilan umum, badan peradilan agama, badan peradilan militer dan badan peradilan tata usaha negara. Dengan tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Keinginan para pencari keadilan supaya perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional sehingga putusan-putusannya yang mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2017) h. 135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak. Hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata³⁰

C. Aspek Filosofis, Aspek Sosiologis dan Aspek Yuridis

Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdiri dari³¹

1. Keadilan (*gerechtigheit*)

Aspek filosofis merupakan aspek yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan, karena keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh masing-masing pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian.

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op. Cit h. 10-11.

³¹Sakhiyatu Sova, "Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch",

2. Kemanfaatan (*zwachmatigheit*)

Aspek sosiologis merupakan aspek yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sedangkan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) yang mencerminkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*sosial justice*).³²

3. Kepastian hukum (*rechtseeherheit*)

Aspek yuridis atau kepastian hukum merupakan aspek yang pertamadan utama dengan berpatokan kepada Undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-undang, harus mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.

Hakim dalam memutus perkara harus mengandung ketiga unsur tersebut. Namun dalam praktik pengadilan, sering terjadi benturan diantara ketiga unsur tersebut. Misalnya aspek keadilan dan aspek kemanfaatan, ketika aspek keadilan akan digunakan maka aspek kemanfaatan dikorbankan, demikian pula sebaliknya. Menurut GustavRadbruch teori ini dikenal dengan istilah asas prioritas, yaitu jika terjadi benturan ketiga aspek tersebut maka yang didahulukan adalah aspek keadilan kemudian aspek kemanfaatan dan terakhir barulah pada aspek kepastian hukum.³³

³²<https://www.scribd.com/mobile/doc/170579596/Tiga-Nilai-Dasar-Hukum-Menurut-Gustav-Radbruch/> diakses 2 Desember 2017

³³ Sani, Abdullah. *Hakim dan Keadilan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang. (1977). H.77

D. Teori Penjatuhan Putusan

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan suatu perkara, salah satunya yaitu Teori Keseimbangan.³⁴ Maksud dari teori keseimbangan ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat. Keseimbangan pada perkara perdata. dapat dilihat dari ketentuan Pasal 163 HIR / Pasal 283 Rbg / Pasal 1865 KUHPerdara yang mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktek peradilan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat harus membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.

E. Macam-macam Putusan Akhir

Putusan akhir dalam suatu perkara perdata umumnya berupa :

1. Gugatan Dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti kebenarannya (*autentik*) dan tidak

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disangkal oleh pihak penggugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan dikabulkan seluruhnya dikabulkan juga sebagian.

2. Gugatan Ditolak

Pada umumnya gugatan ditolak disebabkan bukti-bukti yang diajukan kepengadilan oleh penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya (*keautentikannya*) didalam persidangan dan gugatannya melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan tersebut akan ditolak atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.

3. Gugatan Tidak Dapat Diterima

Maksudnya bahwa dalam gugatan terdapat berbagai cacat formil atau gugatannya tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996 antara lain : gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan *error in personal* dalam bentuk diskualifikasi (*plurium litis consortium*), gugatan mengandung cacat (*obscuur libel*), dan gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.³⁵

F. Wanprestasi

Pengertian wanprestasi (*breach of contract*) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

³⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.Cith. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena Kesengajaan, Kelalaian, Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).³⁶

³⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT intermasa, Op. Cit h. 45